

Diktat Sistem Ekonomi Indonesia

Deni Sudrajat, S.Sos., M.Si.

Beni Hartanto, ST., M.Si.

Tine Badriatin, S.Sos., M.Si.

Editor :

Drs. Hafid, M.Si

Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si.

BIOGRAFI PENULIS



Deni Sudrajat, S.Sos., M.Si. Lahir Di Tasikmalaya Pada Tanggal 24 Mei 1974 Menyelesaikan Pendidikan S1 Di Stia Yppt Tasikmalaya Pada Tahun 2003 Di Program Studi Ilmu Administrasi, Kemudian Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S2 Program Studi Pascasarjana Di Tempat Yang Sama Yang Alhamdulillah Lulus Pada Tahun 2011. Sekarang ini saya tereatat sebagai dosen Tetap STIA YPPT Tasikmalaya yang pengangkatannya di mulai pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. Pengalaman mengajar saya selama ini mengajar beberapa mata kuliah di antaranya, Pengantar Ilmu Ekonomi, Sistem Ekonomi Indonesia, SANRI, Etika administrasi Publik.



Beni Hartanto, ST., M.Si. Kelahiran Ciamis, 14 November 1973. Alumni dari STIA YPPT Priatim Program pascasarjana lulus tahun 2015, dimana saat ini merupakan Dosen Tetap STIA YPPT Priatim Tasikmalaya sejak 2009 pengampu mata kuliah Komputer Bisnis, Teknologi Informasi Administrasi, Komputer Terapan, Manajemen Resiko, Aplikasi Komputer Bisnis, Manajemen Proyek, Manajemen Resiko dan Manajemen Aset.



Tine Badriatin, S.Sos., M.Si. Kelahiran Kota Tasikmalaya Alumni dari STIA YPPT Priatim Program Magister Administrasi negara lulus tahun 2015, dimana saat ini merupakan Kepala Kantor Perwakilan Tasikmalaya PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk dan juga merupakan Dosen Praktisi Prodi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya pengampu mata kuliah Pasar Modal dan Lab Praktika Pasar Modal. Pemegang License Sertifikasi WPPE Pasar Modal dan Sertifikasi BNSP Digital Marketing

Diktat Sistem Ekonomi Indonesia

Diktat ini merupakan kumpulan bahasan para ahli dari beberapa literatur Sistem Ekonomi dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian Indonesia. Selain bahasan Sistem-sistem ekonomi, dibahas pula mengenai Koperasi Indonesia, Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaku ekonomi nasional dan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.



Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5581-45-3



9 786235 581453

DIKTAT SISTEM EKONOMI INDONESIA

Deni Sudrajat, S.Sos., M.Si.

Beni Hartanto, ST., M.Si.

Tine Badriatin, S.Sos., M.Si.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

DIKTAT SISTEM EKONOMI INDONESIA

Penulis : Deni Sudrajat, S.Sos., M.Si.
Beni Hartanto, ST., M.Si.
Tine Badriatin, S.Sos., M.Si.

Editor : Drs. Hafid, M.Si
Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5581-45-3

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2021
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Alloh SWT, diktat sistem ekonomi Indonesia dapat diselesaikan, meskipun tidak sebaik dan selengkap yang diharapkan. Bahkan sangat sederhana dan bahasanya hanya pokok-pokoknya saja.

Diktat ini merupakan kumpulan bahasan para ahli dari beberapa literatur Sistem Ekonomi dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian Indonesia. Selain bahasan Sistem-sistem ekonomi, dibahas pula mengenai Koperasi Indonesia, Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaku ekonomi nasional dan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tasikmalaya, Oktober 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGERTIAN SISTEM.....	1
BAB 2 SISTEM EKONOMI DAN MASALAHNYA.....	5
BAB 3 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI INDONESIA.....	18
BAB 4 SISTEM EKONOMI INDONESIA.....	26
BAB 5 KOPERASI.....	32
BAB 6 RIWAYAT SINGKAT KOPERASI.....	46
BAB 7 PELAKU EKONOMI NASIONAL.....	51
BAB 8 KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL.....	58
BAB 9 KEBIJAKAN MONETER KONVESIONAL DAN SYARIAH.....	63
BAB 10 SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL DALAM PEREKONOMIAN.....	67
BAB 11 TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI.....	70
BAB 12 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.....	76
BAB 13 PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	82
BAB 14 KETENAGAKERJAAN.....	85
BAB 15 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.....	89
BAB 16 PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.....	91
BAB 17 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	99
TENTANG PENULIS.....	100

BAB 1 | PENGERTIAN SISTEM

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia :

1. Sistem adalah seperangkaian unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk sesuatu totalitas.
2. Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan teori dan asas.
3. Sistem adalah metode atau cara.

Disamping itu banyak pendapat dari beberapa sarjana, diantaranya :

Chester A. Bernard, menyatakan : “sistem adalah satu kesatuan yang terpadu secara holistik yang didalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing bagian tersebut memiliki ciri dan cara tersendiri. Masing-masing bagian itu memiliki keterkaitan yang saling mendukung.

Secara teoritis pengertian sistem ekonomi menurut Linger adalah: “Keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh suatu bangsa dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.”

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi sendiri, menurut Louck adalah : “pedoman, aturan atau kaidah yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dalam melakukan produksi, distribusi dan atau konsumsi, terhadap barang-barang dan jasa.

Sistem ekonomi secara umum mencakup keseluruhan proses dan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam upaya memiliki kebutuhan hidupnya bentk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

BAB | SISTEM 2 | EKONOMI DAN MASALAHNYA

Menurut Farida (2011 : 19) setiap negara memiliki sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pilihan terhadap sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara bergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Biasanya, kesepakatan nasional ini berdasarkan undang-undang dasar yang dimiliki. Disamping itu, undang-undang dasar, falsafah, dan ideologi negara juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara.

A. Tiga Persoalan Pokok Ekonomi :

- a. Jenis dan jumlah barang serta jasa yang harus diproduksi (what). What adalah pemilihan jumlah serta jenis barang dan jasa yang harus dihasilkan. What menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi yang terkait dengan pertanyaan, jenis barang apakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya ?
- b. Cara sistem ekonomi menghasilkan barang dan jasa (how). How adalah pemilihan cara menghasilkan barang dan jasa. How menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh sistem perekonomian yang terkait dengan pertanyaan, bagaimana menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai kemakmuran? Artinya, setiap sistem ekonomi harus dapat menjawab persoalan cara yang ditempuh oleh suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa.
- c. Cara distribusi dan jasa (for whom), For Whom adalah pemilikan kelompok masyarakat yang harus menikmati

BAB 3 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Seperti kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut. Dalam lembaga-lembaga ekonomi menunjukkan adanya bandul jam (*swings of pendulum*) yang bergeser kekiri dan kekanan. Kekananan berarti liberalisasi atau reliberalisasi dan kekiri berarti sentralisasi atau resentralisasi. Dalam sistem Indonesia unsur-unsur liberal-kapitalistik dan sosial-komunistik jelas terkandung dalam pengorganisasian sistem ekonomi Indonesia.

Pergulatan tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung. Hal ini tercermin dari perkembangan pemikiran tentang Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). menurut Sri-Edi Swasono (1985). Pergulatan pemikiran tentang SEP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

A. Pasal –pasal Ekonomi dalam UUD 1945

Wakil Presiden RI dalam pidato konferensi ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Pebruari 1946 ditegaskan bahwa dasar sistem ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

BAB | SISTEM 4 | EKONOMI INDONESIA

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Di dalam usaha-usaha membina sistem ekonomi yang khas bagi Indonesia, sebaiknya kita berpegang pada pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya dokumen “Lahirnya Pancasila” dan UUD 45, khususnya Pasal 23, 27, 33, dan 34, serta sila “Keadilan Sosial” yang paling relevan untuk ekonomi. Sila ini mengandung dua makna, yaitu sebagai prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi.

Prinsip demokrasi ekonomi terjelma dalam UUD 45 Pasal 23,27,33 dan 34. Dalam Pasal 23 yang menonjol adalah hak budget DPR. Hal ini menetapkan bahwa pemerintah boleh menginginkan berbagai rencana dan proyek, tetapi instansi terakhir adalah rakyat yang memutuskan apakah rencana atau proyek tersebut dilaksanakan. Karena hak-budget, penetapan tersebut sumber penerimaan negara (pajak) dan macam-macam serta harga mata uang berada di tangan DPR. Inilah prinsip *medezeggenschap* atau demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila kita. Untuk mengecek apakah pemerintah tidak menyimpang dari kehendak DPR, DPR dapat menggunakan pemeriksaan melalui Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam sistem ekonomi yang menjamin demokrasi-ekonomi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27). Hak atas pekerjaan tidak selalu *privilege* atau *kliik* atau golongan tertentu. Semua berhak memperoleh *equal opputunity*.

BAB 5 | KOPERASI

Bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan :

BAB | RIWAYAT 6 | KOPERASI

A. Riwayat Koperasi di Inggris

Sebagai akibat timbulnya revolusi industri di Inggris iadalah kemelaratan yang menimpa nasib kaum buruh. Keadan mereka sangat menyedihkan, sehingga menarik perhatian seorang direktur pabrik bernama R. Owen (1771 - 1858) Dia menganjurkan kaum buruh mendirikan toko-toko, dan menguasai pertanian di sekitar tempat tinggal itu. Tetapi anjuran ini mengalami kegagalan, karena belum adanya kesadaran dari kaum buruh. Kemudian muncul seorang dokter bernama William King dia sangat mengetahui nasib buruh, karena sering berobat kepadanya. Dia mencoba menganalisa apa kelemahan-kelemahan dari koperasi itu. Akhirnya dia sampai ke kesimpulan :

Kelemahan koperasi itu diantaranya ialah :

- Kurangnya kesadaran anggota dan
- Kelemahan dari kepengurusannya sendiri.

Kemudian oleh Charles Howart didirikanlah koperasi di Rochdale, yang kemudian menjadi sangat maju dan terkenal dengan beberapa prinsipnya.

Tapi pada permulaan koperasi ini didirikan, orang yang mentertawakannya, dan dianggap orang sebagai koperasi orang-orang sinting. Orang tidak percaya, dan tak masuk akal, karena kecilnya modal koperasi itu. Modal pertamanya hanya cukup untuk membeli beberapa kilo bahan makanan untuk dijual, dan tokonya terletak disebuah gudang busuk. Tapi berkat ketekunan para pengurusnya akhirnya koperasi itu

BAB | PELAKU 7 | EKONOMI

Pelaku Ekonomi Nasional selain koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang cukup besar perannya dalam perekonomian nasional adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara :

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- (3) Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum

BAB 8 | KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

A. Pengertian Kebijakan Moneter (*Monetary Policy*)

Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan *output* keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a. Kebijakan moneter ekspansif/*monetary expansive policy*, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar;
- b. Kebijakan moneter kontraktif/*monetary contractive policy*, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*high money policy*).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu sebagai berikut :

1. Operasi pasar terbuka (*open market operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Sebaliknya, jika ingin jumlah

BAB 9 | KEBIJAKAN MONETER KONVESIONAL DAN SYARIAH FISKAL

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang suatu negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang untuk memengaruhi variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang, baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum dan stabilitas ekonomi.

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 152, yang artinya : "*.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.....*"

Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali *money supply* untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan instrumen yang digunakan agar target tersebut dicapai. Instrumen-instrumen

BAB | SEKTOR FORMAL DAN 10 | INFORMAL DALAM PEREKONOMIAN

A. Sektor Formal

Sektor usaha formal, yaitu sektor usaha yang resmi berbadan hukum atau yang memiliki dasar hukum yang formal. Dasar hukum tersebut, yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), (2), (3). Pelaku dalam perekonomian di Indonesia yang termasuk dalam sektor formal, yaitu BUMN/BUMD, BUMS, dan Koperasi.

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada beberapa BUMN di Indonesia, yaitu pada kepemilikannya dengan membuat BMUN menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Jenis-Jenis BUMN :

a. Perusahaan Perseorangan (persero)

Perusahaan perseorangan, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan mengejar keuntungan, maksud dan tujuan mendirikan persero untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

BAB 11 | TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut Subandi (2011) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau Negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, pertumbuhan tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional, meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi output suatu bangsa. Ini cukup representatif dan sangat lazim digunakan. dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan Negara lain. Pendapatan Nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan dengan negara lain. Disamping itu, pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh turunannya (*dirteyd measure*) seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

1. Beberapa Teori Pertumbuhan Ekonomi

Friedrich List adalah penganut paham *Laissez faire* dan berpendapat bahwa sistem ini dapat menjamin alokasi sumber optimal, tetapi proteksi terhadap industri-industri tetap diperlukan. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya tergantung kepada peranan pemerintah, organisasi-organisasi swasta, entrepreneur, dan kebudayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi apabila apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Friedrich List berpendapat bahwa hanya dinegara-negara yang berhawa sedang paling cocok untuk industri, kerana kepadatan penduduk yang sedang dan merupakan pasar yang cukup, disamping sektor pertanian yang sudah

BAB | PERTUMBUHAN 12 | EKONOMI INDONESIA

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang (masa reformasi) Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik. Pada masa orde lama kegiatan pemerintahan lebih banyak tertumpu pada urusan politik, pada masa orde baru kegiatan pemerintahan mengarah ke urusan ekonomi (walaupun terkesan monopolistik), dan pada masa reformasi sekarang cenderung ke urusan politik kembali, namun demikian urusan ekonomi juga menjadi perhatian serius, lebih-lebih dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dijelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

A. Masa Orde Lama (1945 - 1966)

Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet. Pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan dengan laju pertumbuhan 6,9% pada periode 1952-1958, turun drastis menjadi 1,9% dalam periode 1960-1965. Sementara itu, defisit anggaran belanja pemerintah terus meningkat dari, tahun ke tahun. Defisit anggaran tersebut dibiayai dengan pencetakan uang baru, sehingga tingkat harga

BAB | PROGRAM

13 | PEMBANGUNAN

| NASIONAL

Krisis ekonomi dan moneter, serta gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, ditandai dengan tumbangannya rezim Orde baru yang otoriter, mendorong terjadinya kemajuan dibidang politik, penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masyarakat dengan mengurangi peran pemerintah dalam kehidupan politik, dengan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998; Penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 dengan banyak partai. Dan Sidang Umum MPR 1999 yang menyusun GBHN 1999 - 2004, serta melahirkan pemerintahan baru di bawah Presiden Abdurrahman Wahid.

Pemerintahan baru ini menyusun Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) berdasarkan GBHN tersebut dengan 12 Misi, dan 3 diantaranya prioritas dibidang ekonomi. Yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan RI;
3. Perwujudan kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu

BAB 14 | KETENAGAKERJAAN

Keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Indonesia batas usia kerja yang dianut minimal 10 tahun, tanpa batas maksimum. India menggunakan rentang usia antara 14 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan menurut versi Bank Dunia, usia kerja antara 15 hingga 64 tahun.

Tenaga kerja (*man power*) dipilah menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja (tidak termasuk angkatan kerja) ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah (pelajar dan mahasiswa), pengurus rumah tangga (ibu-ibu bukan wanita karier), serta penerimaan pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen).

Angkatan kerja dibedakan menjadi dua sub-kelompok yaitu pekerja dan penganggur. Yang dimaksud dengan pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan (saat disensus/disurvey) dan memang

BAB | PEMBANGUNAN 15 | EKONOMI DAERAH

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat desentralisasi, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Sebelum kita membicarakan masalah pembangunan ekonomi daerah, marilah kita bahas tentang pengertian daerah (*regional*), karena daerah memiliki beberapa pengertian yang berbeda, hal ini tergantung pada aspek tinjauannya. Misalnya pengertian daerah ditinjau dari aspek hukum, aspek keamanan, aspek pemerintahan, dan sebagainya. Namun dalam bagian ini pengertian daerah hanya akan kita tinjau dari aspek ekonomi saja.

Ditinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dri segi pendapatan perkapita. Sosial budaya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah yang memiliki ciri-ciri seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi,

BAB 16 | PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Lincoln Arsyad, (2000) mengatakan bahwa ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah.

A. *Entrepreneur*

Peran pemerintah daerah sebagai *entrepreneur*, adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

B. Koordinator

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah.

BAB | STRATEGI 17 | PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Sebelum membahas strategi pembangunan ekonomi daerah, kita coba mengingat kembali tujuan strategi pembangunan ekonomi. Secara umum strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Lincol Arsyad (2000) secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

A. Strategi Pembangunan Fisik (*Locality or Physical Development Strategy*)

Melalui Pengembangan Program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (*civic center*) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu :

DAFTAR PUSTAKA

Dumairi, 1997, *Perekonomian Indonesia* : Bandung, Pustaka Setia

Farida, Ai Siti, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia* : Bandung,
Pustaka Setia

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, 2008, *Pengantar Ilmu
Ekonomi* : Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI.

Subandi, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia* : Bandung, Alfabeta.

Dokumen :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen ke empat)
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara.

TENTANG PENULIS



Deni Sudrajat, S.Sos., M.Si. Lahir Di Tasikmalaya Pada Tanggal 24 Mei 1974 Menyelesaikan Pendidikan S1 Di Stia Yppt Tasikmalaya Pada Tahun 2003 Di Program Studi Ilmu Admnistrasi , Kemudian Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S2 Program Studi Pascasarjana Di Tempat Yang Sama Yang Alhamdulillah Lulus Pada Tahun 2011. Sekarang ini saya tercatat sebagai dosen Tetap STIA YPPT Tasikmalaya yang pengangkatannya di mulai pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. Pengalaman mengajar saya selama ini mengajar beberapa mata kuliah di antaranya, Pengantar Ilmu Ekonmi, Sistem Ekonomi Indonesia, SANRI, Etika admnistrasi Publik.



Beni Hartanto, ST., M.Si. Kelahiran Ciamis, 14 November 1973. Alumni dari STIA YPPT Priatim Program pascasarjana lulus tahun 2015, dimana saat ini merupakan Dosen Tetap STIA YPPT Priatim Tasikmalaya sejak 2009 pengampu mata kuliah Komputer Bisnis, Teknologi Informasi Administrasi, Komputer Terapan, Manajemen Resiko, Aplikasi Komputer Bisnis, Manajemen Proyek, Manajemen Resiko dan Manajemen Aset.



Tine Badriatin, S.Sos., M.Si. Kelahiran Kota Tasikmalaya Alumni dari STIA YPPT Priatim Program Magister Administrasi negara lulus tahun 2015, dimana saat ini merupakan Kepala Kantor Perwakilan Tasikmalaya PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk dan juga merupakan Dosen Praktisi Prodi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya pengampu mata kuliah Pasar Modal dan Lab Praktika Pasar Modal. Pemegang License Sertifikasi WPPE Pasar Modal dan Sertifikasi BNSP Digital Marketing.